

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arif, Fahmi. 2019. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Tulungagung: Diklat Tidak Diterbitkan.
- Arsyad, Jawade Hafidz. 2013. *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Khalid. 2014. *Ilmu Perundang-Undangan*. Medan: CV. Manhaji dan Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara.
- Ridwan, Juniarso, dan Achmad Sodik Sudrajat. 2014. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia..
- Santoso, Aris Prio Agus, Rezi, Widi Nugrahaningsih, dan Ahmad Rifai. 2021. *Hukum Peradilan TUN (Tata Usaha Negara)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Schwab, Klaus. 2017. *The Global Competitiveness Reports 2017-2018*. Jenewa: World Economic Forum.
<https://www.weforum.org/publications/theglobal-competitiveness-report-2017-2018/>.
- Simanjuntak, Enrico, Andi Muh. Ali Rahman, Umar Dani, Novy Dewi Cahyati, dan Hery Abduh Sasmito. 2021. *Analisis dan Inventarisasi Permasalahan Teknis Hukum atas Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Khususnya di dalam Isu Hukum Fiktif Positif*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Simanjuntak, Enrico Simanjuntak. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ombudsman Republik Indonesia. 2021. *Modul Pelatihan Mediasi/Konsultasi*. Jakarta: Ombudsman.
https://ombudsman.go.id/produk/lihat/577/SUB_BL_5a25a712a8fc9_file_20210511_095306.
- Ombudsman Republik Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan 2023 Ombudsman Republik Indonesia: Perkuat Kerja Sama Perluas Pengawasan Pelayanan Publik*. Jakarta: Ombudsman.
https://ombudsman.go.id/produk/lihat/897/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20240314_134411.

Jurnal

- Al-Fatih, Sholahuddin, dan Mujibur Rahman Khairul Muluk. "Understanding Beschikking, Regeling and Beleidsregel in Indonesian Legal System," *Audito Comparative Law Journal* 4, no. 2 (Mei 2023): hal. 87-95.
- Aristoni. "Tindakan Hukum Diskresi dalam Konsep Welfare State Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam," *Jurnal Penelitian IAIN Kudus* 8, no. 2 (Agustus 2014): hal. 221-246.
- Ariyani, Nita. "Kedudukan Ketetapan MPR dalam Teori dan Praktik Ketatanegaraan di Indonesia," *Jurnal Justiciabelen* 1, no. 2 (September 2018): hal. 267-281.
- E, Elviandri, Khuzdaifah Dimiyati, dan Absori, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia," *Mimbar Hukum* 31, no. 2 (Juni 2019): hal. 252-266.
- Effendi, Winda Roselina. "Konsep Welfare State di Indonesia," *Jurnal Trias Politika* 1, no. 1 (April 2017): hal. 71-83.
- Hadinatha, Miftah Faried. "Penataan Materi Muatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 2 (Juni 2022): hal. 133-137.
- Irvansyah, Andika Risqi. "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Asosiasi Pengajar HTN dan HAN* 1, no. 2 (Juli 2022): hal. 209-226.
- Sindar, Jusak, Jakobus Ronald Mawuntu, dan Donna Okthalia Setiabudhi. "Penyelesaian Sengketa Keputusan Fiktif Positif Pasca Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 2 (April 2023): hal. 6045-6051.

Situs Web

- A, Qotrun. "Metodologi Penelitian: Pengertian, Jenis, Manfaat, dan Tujuan," *Gramedia Blog*, <https://www.gramedia.com/literasi/metodologi-penelitian>.
- Abdullah, Ujang. "Upaya Administrasi dalam Peradilan Tata Usaha Negara," *Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang*, <https://ptun-palembang.go.id/index.php/berita/berita-pengadilan/berita-terkini/299-upaya-administrasi-dalam-peradilan-tata-usaha-negara>.
- Diory, Aidhya. "Siapa Saja yang Termasuk Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara?," *Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia*, 2 November 2021, <https://www.pphbi.com/?p=3056>.
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. "Koordinasi Rperpres tentang Penetapan Keputusan dan/atau

- Tindakan yang Dianggap Dikabulkan secara Hukum.” 10 Mei 2023, https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=5748:koordinasi-rpepres-tentang-penetapan-keputusan-dan-atau-tindakan-yang-dianggap-dikabulkansecara-hukum&catid=268:kegiatan-djpp&Itemid=73&lang=en.
- Fahmi, Muhammad Yusril Izzal Fahmi. “Implikasi Yuridis Pasal 175 Poin 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Terhadap Kewenangan PTUN Memutus Permohonan Fiktif Positif,” UIN Maulana Malik Ibrahim: Skripsi, 2023, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/53423>.
- Hidayat, Rofiq. “Pengaturan Sanksi Pidana Tak Boleh Dituangkan dalam Aturan Turuna,” *HukumOnline*, 10 November 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-sanksi-pidana-tak-boleh-dituangkan-dalam-aturan-turunan-lt5faa40f053a07/?page=all>.
- Irham, Muhammad. “Penentuan Materi Muatan Peraturan Presiden menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” *Fakultas Hukum Universitas Pattimura*, 7 November 2016, <https://fh.unpatti.ac.id/penentuan-materi-muatan-peraturan-presiden-menurut-pasal-13-undang-undang-nomor-12-tahun-2011-tentang-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, s.v. “rekonstruksi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rekonstruksi>.
- Madison, James. “The Structure of the Government Must Furnish the Proper Checks and Balances Between the Different Departments.” *Federalist Papers*. 8 Februari 1788. <https://guides.loc.gov/federalist-papers/text-51-60>.
- Masthuri, Budhi. “Urgensi Pengaturan Ombudsman dalam UUD 1945,” *HukumOnline*, 29 September 2004, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pengaturan-ombudsman-dalam-uud-1945-hol11261/?page=all>.
- Noor, Hendry Julian. “Fiktif Positif dan Diskresi Pasca-UU Cipta Kerja,” *Harian Kompas*, 6 April 2021, <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/04/06/fiktif-positif-dan-diskresipasca-uu-cipta-kerja>.
- Ombudsman Republik Indonesia. “Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) Bawang Putih di Kementerian Perdagangan,” *Siaran Pers Ombudsman*, 17 Oktober 2023, <https://ombudsman.go.id/pers/pers/r/ombudsman-ri-temukan-maladministrasi-dalam-pelayanan-penerbitan-surat-persetujuan-impor-spi-bawang-putih-di-kementerian-perdagangan>.
- Ombudsman Republik Indonesia. “Terkait Laporan SPI Bawang Putih, Ombudsman Pastikan Dirjen Daglu Laksanakan Tindakan Korektif,”

Siaran Pers Ombudsman, 31 Oktober 2023, <https://ombudsman.go.id/news/r/terkait-laporan-spi-bawang-putih-ombudsman-pastikan-dirjen-daglu-laksanakan-tindakan-korektif>.

Rizki, Mochamad Januar. “Memahami Implementasi Terbaru OSS RBA dari Aspek Kebijakan dan Proses Pengisian”, *Hukum Online*, 8 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-implementasi-terbaru-oss-rba-dari-aspek-kebijakan-dan-proses-pengisian-lt63196f628aead/>.

Rizky, Martyasari. “Ombudsman Bongkar Borok Penerbitan Rekomendasi Izin Impor Bawang Putih,” *CNBC Indonesia*, 16 Januari 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240116120116-4-506236/ombudsman-bongkar-borok-penerbitan-rekomendasi-izin-impor-bawang-putih>.

Santia, Tira Santia. “Pengusaha Lapor Dugaan Maladministrasi Impor Bawang Putih ke Ombudsman, Siapa Tertuduh?,” *Liputan6*, 17 Oktober 2023 <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5425568/pengusaha-lapor-dugaan-maladministrasi-impor-bawang-putih-ke-ombudsman-siapa-tertuduh?>.

Setyowati, Hermin Esti. “Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Meluncurkan Sistem OSS,” *Kementerian Komunikasi dan Informatika*, 9 Juli 2018, https://www.kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr.

Zahro’, Nur Eka Fatimatuz. “Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember: Skripsi, 2023, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/23810>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Peraturan Ombudsman No. 31 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Ajudikasi Khusus.

Peraturan Ombudsman No. 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

Dokumen Hukum Lainnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 3/P/FP/2021/PTUN.SBY.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 2/P/FP/2021/PTUN.JPR.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 1/P/FP/2021/PTUN.DPS.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/P/FP/2022/PTUN.BNA.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.JPR.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.KPG.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.BNA

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Surat Edaran Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5743/A.8/B.1/2019 tentang Rencana Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) Versi 1.1 pada tanggal 4 November 2019.

Keputusan Ketua Ombudsman Nomor 67 Tahun 2020 tentang Pedoman Klasifikasi Laporan Masyarakat Di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2020.